



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2022**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa Pemerintah memberikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, prioritas untuk mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. bahwa menindaklanjuti Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2013 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 21);
20. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Jumlah.....

10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada setiap daerah.
17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021 sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah total dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sebesar **Rp. 42.997.762.300,-** (*Empat puluh dua milyar Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah*), rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar **Rp. 42.791.378.640,-** (*Empat puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah*), dihitung berdasarkan jumlah aparatur dan perangkat desa dalam wilayah kabupaten Simeulue.

Pasal 4

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar **Rp. 206.383.660,-** (*Dua ratus enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*), dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis tahun sebelumnya yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10%.....

- a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
- b. 40% (empat puluh per seratus) untuk jumlah penduduk miskin desa;
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah luas wilayah desa; dan
- d. 40% (empat puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 6

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal.....

Pasal 7

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan per triwulan sesuai dengan penerimaan Kas Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD triwulan I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Qanun Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan ADD Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Triwulan II, dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi triwulan I.
- (5) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD Triwulan III dan Triwulan IV dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan ADD triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dari Kepala Desa.

BAB.....

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan untuk peningkatan dukungan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Penggunaan ADD mengacu kepada RPJMDesa dan RKPDesa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADD.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diverifikasi oleh Sekretaris Desa melalui Kepala Seksi sesuai bidangnya atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan APBDesa ditetapkan menjadi Qanun Desa tentang APBDesa.
- (5) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan, wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue dan Inspektur Kabupaten Simeulue serta Camat, berupa ;
 - a. Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* ADD.
- (2) Qanun Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (3) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Triwulan I, II dan III disampaikan paling lambat minggu pertama triwulan berikutnya; dan

b. Laporan.....

- b. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* ADD triwulan IV disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Terdapat Sisa ADD di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD dilakukan terhadap penyaluran ADD triwulan II Tahun Anggaran berjalan, apabila :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a
 - b. Terdapat sisa ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (3) Dalam hal Sisa ADD di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada triwulan II, penyaluran ADD triwulan II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (5) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau Penggunaan ADD.

Pasal 14

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal:
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa ADD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).

(2). Pemotongan.....

- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.

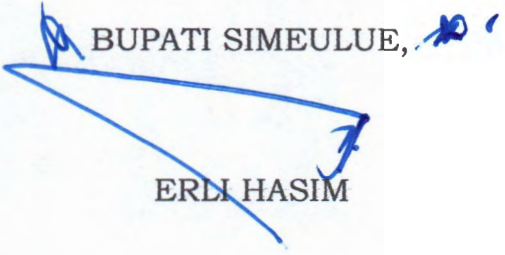
BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

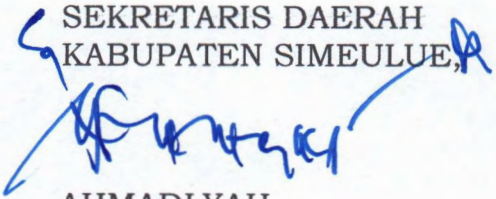
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 02 Maret 2022 M
29 Rajab 1443 H


BUPATI SIMEULUE,
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 02 Maret 2022 M
29 Rajab 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022
NOMOR 4

Lampiran- Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 4 TAHUN 2022
 Tanggal : 02 Maret 2022 M
 29 Rajab 1443 H
 Tentang : Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]= (4) + (5)
I	SIMEULUE TENGAH		4,794,624,000	18,336,000	4,812,960,000
1		WEL WEL	294,210,720	961,000	295,171,720
2		KAMPUNG AIE	316,050,480	1,280,000	317,330,480
3		LAUREE	279,650,880	1,082,000	280,732,880
4		LAMAYANG	303,917,280	1,113,000	305,030,280
5		LAKUBANG	347,543,520	1,081,000	348,624,520
6		LAMBAYA	291,784,080	1,064,000	292,848,080
7		DIHIT	267,517,680	1,132,000	268,649,680
8		LATITIK	303,917,280	1,080,000	304,997,280
9		WELLANGKUM	303,917,280	1,090,000	305,007,280
10		KUTA BARU	303,917,280	937,000	304,854,280
11		SEBBE	279,650,880	1,016,000	280,666,880
12		SUAK BARU	279,650,880	1,101,000	280,751,880
13		LUAN SOREP	291,784,080	1,601,000	293,385,080
14		PUTRA JAYA	303,917,280	1,068,000	304,985,280
15		LAUKE	347,543,520	1,506,000	349,049,520
16		SITUFA JAYA	279,650,880	1,224,000	280,874,880
II	SALANG		4,799,424,000	20,757,000	4,820,181,000
17		UJUNG SALANG	335,410,320	988,000	336,398,320
18		PADANG UNOI	328,183,680	1,412,000	329,595,680
19		NASREUHE	383,943,120	1,655,000	385,598,120
20		MEUNAFI	303,917,280	1,695,000	305,612,280
21		ALONG	291,784,080	1,220,000	293,004,080
22		PANTON LAWE	279,650,880	1,394,000	281,044,880
23		MUTIARA	303,917,280	1,307,000	305,224,280
24		TAMON JAYA	291,784,080	1,271,000	293,055,080
25		KARYA BAKTI	311,143,920	1,471,000	312,614,920
26		JAYA BARU	267,517,680	1,592,000	269,109,680
27		TAMENG	291,784,080	1,241,000	293,025,080
28		LALLA BAHAGIA	279,650,880	1,143,000	280,793,880
29		SUAK MANANG	267,517,680	853,000	268,370,680
30		GANANG PUSAKO	279,650,880	908,000	280,558,880
31		KENANGAN JAYA	279,650,880	1,072,000	280,722,880
32		BUNGA	303,917,280	1,535,000	305,452,280
III	TEUPAH BARAT		5,477,684,400	25,209,000	5,502,893,400
33		SILENGAS	303,917,280	1,455,000	305,372,280
34		BUNON	277,224,240	1,110,000	278,334,240
35		ANGKEO	325,757,040	1,756,000	327,513,040
36		AWE SEUBAL	328,183,680	1,322,000	329,505,680
37		LAAYON	279,650,880	1,144,000	280,794,880
38		INOR	328,183,680	1,437,000	329,620,680
39		SALUR LASENGALU	279,650,880	1,370,000	281,020,880

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
40		SALUR LATUN	279,650,880	1,214,000	280,864,880
41		SALUR	279,650,880	1,424,000	281,074,880
42		PULAU TEUPAH	303,917,280	1,926,000	305,843,280
43		AWE KECIL	325,757,040	993,000	326,750,040
44		NAIBOS	311,143,920	1,279,000	312,422,920
45		LANTIK	328,183,680	1,237,000	329,420,680
46		LEUBANG HULU	311,143,920	1,629,000	312,772,920
47		LEUBANG	303,917,280	1,615,000	305,532,280
48		SITAL	303,917,280	1,252,000	305,169,280
49		MAUDIL	328,183,680	2,076,000	330,259,680
50		NANCALA	279,650,880	970,000	280,620,880
IV	SIMEULUE TIMUR		5,518,991,760	26,041,660	5,545,033,420
51		SUAK BULUH	335,410,320	1,176,000	336,586,320
52		AIR DINGIN	320,717,280	2,093,000	322,810,280
53		AMERIA BAHAGIA	299,010,720	484,660	299,495,380
54		SUKA JAYA	320,717,280	1,108,000	321,825,280
55		SUKA MAJU	352,210,320	1,627,000	353,837,320
56		SUKA KARYA	369,010,320	2,056,000	371,066,320
57		SINABANG	330,557,040	793,000	331,350,040
58		AMAITENG MULIA	279,650,880	734,000	280,384,880
59		LUGU	323,277,120	1,354,000	324,631,120
60		SEFOYAN	335,410,320	1,430,000	336,840,320
61		GANTING	316,050,480	1,841,000	317,891,480
62		KUALA MAKMUR	364,343,520	2,567,000	366,910,520
63		UJUNG TINGGI	311,143,920	1,740,000	312,883,920
64		AIR PINANG	364,396,800	2,700,000	367,096,800
65		PULAU SIUMAT	311,143,920	1,881,000	313,024,920
66		KOTA BATU	279,650,880	1,384,000	281,034,880
67		LINGGI	306,290,640	1,073,000	307,363,640
V	TELUK DALAM		3,005,040,000	15,682,000	3,020,722,000
68		BABUSSALAM	303,917,280	1,114,000	305,031,280
69		MUARA AMAN	279,650,880	1,363,000	281,013,880
70		GUNUNG PUTIH	335,410,320	1,055,000	336,465,320
71		LUGU SEBAHAK	335,410,320	1,393,000	336,803,320
72		KUALA BAKTI	279,650,880	784,000	280,434,880
73		BULU HADIK	279,650,880	1,832,000	281,482,880
74		SAMBAY	294,210,720	1,985,000	296,195,720
75		LUAN BALU	291,784,080	2,396,000	294,180,080
76		TANJUNG RAYA	294,210,720	1,692,000	295,902,720
77		KUALA BARU	311,143,920	2,068,000	313,211,920
VI	SIMEULUE BARAT		4,492,599,360	30,009,000	4,522,608,360
78		LAYABAUNG	328,183,680	3,780,000	331,963,680
79		SEMBILAN	383,943,120	2,812,000	386,755,120
80		SIGULAI	328,183,680	2,385,000	330,568,680
81		SINAR BAHAGIA	303,917,280	1,697,000	305,614,280
82		LAMAMEK	328,183,680	1,672,000	329,855,680
83		BATU RAGI	328,183,680	1,529,000	329,712,680
84		MALASIN	328,183,680	1,326,000	329,509,680
85		BABUL MAKMUR	303,917,280	1,393,000	305,310,280
86		AMABAAN	352,450,080	2,860,000	355,310,080
87		MITEUM	316,050,480	2,178,000	318,228,480
88		LHOK BIKHAU	279,650,880	1,391,000	281,041,880
89		UJUNG HARAPAN	303,917,280	1,855,000	305,772,280
90		SANGGIRAN	303,917,280	1,937,000	305,854,280
91		LHOK MAKMUR	303,917,280	3,194,000	307,111,280

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
VII	TEUPAH SELATAN		5,796,001,680	27,417,000	5,823,418,680
92		SENEUBUK	299,010,720	1,886,000	300,896,720
93		SUAK LAMATAN	267,517,680	1,357,000	268,874,680
94		ALUS ALUS	291,784,080	1,879,000	293,663,080
95		BATU RALANG	279,650,880	1,291,000	280,941,880
96		ULUL MAYANG	303,917,280	1,019,000	304,936,280
97		KEBUN BARU	303,917,280	1,613,000	305,530,280
98		BADEGONG	303,917,280	1,212,000	305,129,280
99		LATIUNG	279,650,880	1,249,000	280,899,880
100		PASIR TINGGI	291,784,080	1,379,000	293,163,080
101		LABUHAN JAYA	279,650,880	1,621,000	281,271,880
102		LABUHAN BAJAU	279,650,880	1,593,000	281,243,880
103		BLANG SEBEL	303,917,280	1,578,000	305,495,280
104		ANA AO	316,050,480	1,606,000	317,656,480
105		LATALING	335,410,320	1,477,000	336,887,320
106		PULAU BANGKALAK	291,784,080	1,537,000	293,321,080
107		LABUHAN BAKTI	352,450,080	1,687,000	354,137,080
108		TRANS JERNGE	359,676,720	1,169,000	360,845,720
109		TRANS MERANTI	347,543,520	1,109,000	348,652,520
110		TRANS BARU	308,717,280	1,155,000	309,872,280
VIII	ALAFAN		2,528,297,280	16,679,000	2,544,976,280
111		LEWAK	328,183,680	2,716,000	330,899,680
112		LAMEREM	291,784,080	1,568,000	293,352,080
113		LHOK PAUH	347,543,520	2,138,000	349,681,520
114		SERAFON	296,637,360	1,627,000	298,264,360
115		LANGI	291,784,080	2,144,000	293,928,080
116		LUBUK BAIK	352,396,800	2,609,000	355,005,800
117		LHOK DALAM	291,784,080	1,672,000	293,456,080
118		LAFAKHA	328,183,680	2,205,000	330,388,680
IX	TEUPAH TENGAH		3,697,700,400	16,906,000	3,714,606,400
119		MATANURUNG	291,784,080	1,717,000	293,501,080
120		LASIKIN	359,676,720	1,602,000	361,278,720
121		LANTING	294,210,720	1,101,000	295,311,720
122		BUSUNG INDAH	335,410,320	1,254,000	336,664,320
123		KAHAD	299,010,720	1,951,000	300,961,720
124		SIMPANG ABAIL	323,277,120	1,051,000	324,328,120
125		ABAIL	267,517,680	1,150,000	268,667,680
126		NANCAWA	299,064,000	1,601,000	300,665,000
127		LABUAH	267,517,680	1,053,000	268,570,680
128		SUA-SUA	320,903,760	1,439,000	322,342,760
129		BATU-BATU	347,543,520	1,847,000	349,390,520
130		SITUBUK	291,784,080	1,140,000	292,924,080
X	SIMEULUE CUT		2,681,015,760	9,347,000	2,690,362,760
131		BUBUHAN	359,676,720	858,000	360,534,720
132		AMARABU	359,676,720	1,532,000	361,208,720
133		KUTA INANG	323,330,400	947,000	324,277,400
134		KUTA PADANG	316,050,480	1,162,000	317,212,480
135		SIBULUH	347,543,520	1,348,000	348,891,520
136		LATAK AYAH	335,410,320	946,000	336,356,320
137		BORENGAN	303,917,280	1,359,000	305,276,280
138		UJUNG PADANG	335,410,320	1,195,000	336,605,320
JUMLAH TOTAL			42,791,378,640	206,383,660	42,997,762,300

BUPATI SIMEULUE

ERLI HASIM